

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dialokasikan dari APBN (Anggaran Penerimaan Negara) berdasarkan pasal 72 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada alinea pasal yang telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 2014 menjadi 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara wajar. pada:

- a) Alokasi dasar, dan
- b) Alokasi yang dihitung memperhitungkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa kabupaten/kota. (Sukanto, 2014:3).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga mampu menciptakan

landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. masyarakat.

Selanjutnya diharapkan pula terwujudnya desa mandiri dimana:

- a) Desa tidak hanya sekedar objek penerima manfaat, namun juga subjek yang memberikan manfaat kepada anggota masyarakat setempat;
- b) Sebagai komponen, desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan penghidupan warga masyarakat.
- c) Desa mempunyai kemampuan untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal seperti pangan, energi, pelayanan dasar dan lain-lain.

Sebagai tujuan jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan kerja, memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli desa yang cukup. (Chabib Sholeh, 2015:54).

Oleh karena itu, pemerintah desa harus mengambil tindakan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat yang telah mengulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah merupakan unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat desa. .

Saat ini pengalokasian dana desa sangat intensif dilakukan oleh pemerintah dan daerah untuk dijadikan sebagai sumber awal pendapatan desa. Hal ini terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa. Hal ini melalui berbagai proses agar penggunaan dana desa sesuai dengan pemerintah daerah dan pusat, pemenuhan tersebut berdampak pada sektor perekonomian, seperti program pemberdayaan masyarakat seperti di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura yang memprogram simpan pinjam perempuan untuk keperluan desa. manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini tentunya berdampak pada sektor perekonomian masyarakat itu sendiri, dan tentunya membuat masyarakat semakin berdaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa tersebut, maka program pembangunan dan pemberdayaan menjadi tujuan utama, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana pengalokasian dana tersebut dengan baik yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pembangunan manusia yang autentik dan integral terhadap masyarakat lemah, miskin, terpinggirkan, dan kurang mampu serta memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi agar lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun mampu berpartisipasi dalam pembangunan pengembangan masyarakat. (Chandra Kusuma Putra, 2014:2).

Oleh karena itu, pemerintah desa harus kembali menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yaitu:

- a) Membina kehidupan masyarakat desa.
- b) Membina perekonomian desa.
- c) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- d) Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pola pendek atau pemberdayaan masyarakat yang paling efektif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan merangsang masyarakat agar mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan untuk bekerja sama serta menumbuhkan rasa gotong royong di kalangan warga desa.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal kebutuhan, pengembangan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi perekonomian lokal berdasarkan kondisi dan potensi desa.

Arthur Lewis dalam (Mudrajad Kuncoro, 2010:110) membahas tentang proses pembangunan yang terjadi antara perkotaan dan pedesaan, yang meliputi proses urbanisasi yang terjadi antara kedua tempat tersebut, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan agar tidak terjadi kesenjangan sosial antar wilayah pedesaan dan masyarakat perkotaan, hal ini juga dapat

membangun Indonesia yang lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Dana Desa Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura digunakan untuk pembangunan jalan poros dusun, jalan poros desa, jalan lingkungan, jalan setapak, jalan akses darat, gerbang kampung dan lain sebagainya. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura secara merata sesuai kebutuhan desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa, dengan melakukan perencanaan pembangunan dari desa, melaksanakan, memantau dan melaporkan hasil penggunaan Dana Desa untuk pembangunan.

Ketimpangan dan kesenjangan ekonomi pada masyarakat kampung dipengaruhi oleh penggunaan dana desa yang tidak tepat sehingga berdampak pada masyarakat desa. Perangkat kampung mempunyai kewenangan mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat dalam hal kesejahteraan ekonomi.

Implementasi bidang pemberdayaan masyarakat kampung di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura meliputi pelatihan tim pengelola kegiatan, pengembangan fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat, pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem informasi kampung, pengembangan potensi kampung, pengembangan perencanaan partisipatif, dan pelatihan kewirausahaan. Penggunaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kampung sangat ditentukan

oleh kebijakan yang diambil oleh perangkat kampung. Keterlibatan masyarakat dalam setiap elemen memberikan dampak positif.

Pemberdayaan ekonomi di tingkat kampung mempunyai dampak positif dan negatif. Keterlibatan masyarakat dalam pelibatan sangat penting dalam pemberdayaan seperti pembekalan ekonomi kreatif yang dilakukan di tingkat desa untuk menunjang perekonomian di kampung. Dampak negatifnya adalah sebagian masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, hal ini dipengaruhi oleh komunikasi yang buruk.

Terdapat beberapa implementasi pembangunan infrastruktur di kampung yang terlaksana dengan baik, penggunaan dana desa ditujukan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat yang partisipatif menjadikan pembangunan tepat sasaran dan berkeadilan. Di sisi lain, permasalahan yang dihadapi masyarakat desa antara lain tidak dimanfaatkannya tenaga kerja harian lokal sehingga menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada masyarakat yang mempunyai kemampuan melakukan pekerjaan kasar sehingga menimbulkan dampak sosial ekonomi yang negatif.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membahas tentang Pengelolaan Dana Desa, ternyata keberadaan dana desa memberikan pengaruh terhadap pembangunan masyarakat dan perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang sesuai dengan harapan penerimaan manfaat pembangunan desa, khususnya dalam mengembangkan perekonomian kampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, peneliti ingin melengkapinya dengan data-data terkait dan melakukan penelitian dengan objek yang berbeda. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura, peneliti menemukan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura adalah transparansi dan akuntabilitas. Artinya dalam pengelolaan Dana Desa tidak ada yang dirahasiakan atau disembunyikan dari masyarakat, dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dengan pengelolaan Dana Desa yang baik maka pembangunan desa dapat ditingkatkan, begitu pula sebaliknya jika pengelolaannya tidak baik maka pembangunan desa tidak akan maju, dan untuk memastikan serta mengetahui apakah pengelolaan Dana Desa di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura baik, baik atau sebaliknya dalam pembangunan dan perekonomian masyarakat di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Pemerintah harus mengoptimalkan pelayanan publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, karena merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengkajinya lewat suatu penelitian yang berjudul : “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura” .

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura?
2. Apakah pengelolaan Dana Desa dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Dana Desa di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura
- c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Bagi kepentingan penelitian, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa suatu masalah dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
- b. Bagi kepentingan akademik, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini merupakan salah satu bahan masukan terkait dengan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
- b. Bagi masyarakat, hasil menelitian ini merupakan sebuah kajian praktis yang dapat membuka wawasan berfikir masyarakat dalam aspek pengelolaan Dana Desa.